

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Utama:

Al-Qur'an

Al Hadist

### B. Buku – Buku:

Ali Ahmad Chomsah, *Hukum Pertanahan II Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri hukum Pertanahan IV*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia*, Jilid 2, Prestasi Pustaka Publisier, Jakarta, 2004.

A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Amirudin dan Zainal Ashikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. RajawaliPers, 2004.

Ari Sukanti Hutagalung, *Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum yang Berlaku*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.

Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Inonesia dan Peraturan Pelaksanannya, Cet I*, Alumni, Bandung, 1993.

Bachsas Mustofa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remadja Karya, Bandung, 1988.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Benny Bosu, *Perkembangan Terbaru Sertipikat*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 1997.

- Boedi Harsono, *Sejarah Undang-undang Pokok Agraria*, Jambatan, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Pengukuran, Isi dan Pelaksanaan*, Pemegang Jabatan, Jakarta, 1994.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria I*, Badan Penerbitan Fakultas Hukum UI, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Reformasi*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- G.Kartasapoetra, dkk, *Hukum Tanah, Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, USA, 1991.
- Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negera dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003.
- JB.Daliyo, *Hukum Agraria*, Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Jimmy J. Sembiring, *Panduan Menugurus Sertipikat Tanah*, Visi Media, Jakarta, 2010.
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Kompas, 2005.
- Mulyo Putro, *Pluralisme hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Fokusmedia, Bandung, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Ronny Hanintjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991.
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karunia, Jakarta, 1998.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya (1996)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.  
UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104, TLN No. 2043.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 10  
Tahun 1961.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 24 Tahun 1997, LN No. 59, TLN No. 3696.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Tentang Nadan Pertanahan Nasional*. PP No. 10 Tahun 2006.

\_\_\_\_\_, *Keputusan Presiden Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan*. Kepres No. 34 Tahun 2003, LN No. 60 Tahun 2003.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara*. Permen No. 3 Tahun 1999.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*. Permen No. 9 Tahun 1999.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Permen Agraria No. 3 Tahun 1997.

#### **D. Artikel Ilmiah/Jurnal :**

Yudhi Setiawan dan Boedi Djatmiko Hadiatmodjo. Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Alasan Cacat Yuridis Aspek Substantif. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Apr 2010 volume 28 No.1

Jurnal Landreform Volume 2/Des2014 MEMBANGUN KEKUATAN POLITIK AGRARIA

H. Akh. Munif, Perlindungan Hukum Terhadap Hak - Hak Rakyat Atas Tanah Dalam Pembangunan (Kajian Atas Perpres No. 65 Tahun 2006) , *Volume 11, No.1 Mei 2011*

#### **E. Internet :**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

[www.birohukum.pu.go.id/negara/peraturan](http://www.birohukum.pu.go.id/negara/peraturan).